Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 6854-6864

Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Memajukan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Wamena

Lazarus Suyatno Vianney[2], Debi Dince Yoweni[2], Timotius Wakla[3], Yunus Wantik[4]
[1,2,3,4]Prodi Manajemen, Universitas Baliem Papua
Corresponding Author: Lazarus Suyatno Vianney, E-Mail: Salysuyatno@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRACT

This study examines the influence of the role of local government on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Wamena City, Papua Mountains Province. Using quantitative descriptive methods and simple linear regression analysis, the results of the study indicate that the role of government has a positive and significant influence on the development of MSMEs. The government's contribution through human resource training, provision of capital assistance, and easy access to licensing and technology has been proven to significantly increase the capacity and competitiveness of MSMEs. This finding emphasizes the importance of strategic support from local governments in strengthening the MSME ecosystem, especially in areas with challenging geographic and social conditions such as Wamena. Research recommendations emphasize the need for ongoing training programs, easy access to capital, development of technological infrastructure, and involvement of local communities in the planning and implementation of MSME development programs. Thus, local governments are expected to continue to improve the quality and welfare of the community through sustainable MSME empowerment based on local potential.

Keywords: *Role of Local Government, MSMEs, Wamena City, Economic Development, Community Empowerment.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan ini tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa baik sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun ekonomi dan dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berperan sebagai subjek dan objek pembangunan, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan akselerator dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan pembangunan berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Ekonomi yang kuat menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Menurut Menajang (2019), pembangunan ekonomi adalah proses berkelanjutan yang memungkinkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang melalui perubahan struktural dan institusional yang mendukung pertumbuhan produktivitas. Dalam konteks Indonesia yang memiliki struktur demografi yang besar dan

wilayah geografis yang luas serta kompleks, pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif dan menjangkau hingga ke tingkat daerah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari kontribusi dan peran pemerintah daerah.

Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai pendorong utama ekonomi nasional. UMKM merupakan sektor yang terbukti tangguh dalam menghadapi krisis, fleksibel dalam adaptasi pasar, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional, dan berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal karena cenderung berbasis pada sumber daya lokal, baik itu bahan baku, tenaga kerja, maupun pasar. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena memiliki kewenangan langsung dalam mengelola sumber daya daerah serta menyusun program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang ekonomi, termasuk pengembangan UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berperan sebagai penyedia regulasi, tetapi juga sebagai mitra aktif yang mampu memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, akses permodalan, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM. Karimah et al. (2021) menegaskan bahwa dukungan pemerintah melalui pelatihan dan bantuan teknis dapat meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat dan secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga.

Namun demikian, meskipun kontribusi UMKM sangat besar terhadap ekonomi nasional, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, antara lain: keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya kualitas SDM pelaku usaha, keterbatasan dalam penggunaan teknologi, serta lemahnya akses ke pasar yang lebih luas, khususnya pasar digital dan ekspor. Kondisi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan banyak sektor ekonomi, termasuk UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya strategi penguatan UMKM yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran sentral dalam memetakan potensi dan permasalahan UMKM di wilayahnya masing-masing. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam pengembangan UMKM adalah pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan. Model ini menekankan pada pentingnya membangun kapasitas sosial dan institusional masyarakat melalui pendampingan, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan jaringan antar

pelaku usaha. Sumadi (2021) menunjukkan bahwa inovasi dan kreativitas masyarakat dapat tumbuh ketika pemerintah daerah secara aktif memberikan dukungan, ruang, dan fasilitas yang mendukung iklim usaha yang sehat.

Budiyanto dan Effendy (2020) menambahkan bahwa pemerintah daerah yang sukses dalam membangun ekosistem UMKM umumnya memiliki strategi pengembangan yang terintegrasi, mulai dari pembinaan sejak awal, pemberian insentif usaha, hingga promosi produk secara digital. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM serta membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga keuangan.

Digitalisasi menjadi salah satu solusi strategis dalam menghadapi tantangan UMKM, terutama dalam mengakses pasar dan mengelola usaha secara efisien. Pemerintah daerah perlu memainkan peran kunci dalam membangun infrastruktur digital, menyediakan pelatihan literasi digital, serta mendorong digitalisasi layanan publik yang mendukung UMKM. Maharani & Nurlukman (2021) meneliti digitalisasi UMKM di Kota Tangerang dan menemukan bahwa integrasi teknologi digital ke dalam proses bisnis UMKM berkontribusi signifikan terhadap efisiensi operasional, perluasan pasar, dan peningkatan pendapatan.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan basis data UMKM yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta untuk memastikan bahwa program bantuan dan pelatihan benar-benar tepat sasaran. Sinergi lintas sektor juga diperlukan, di mana perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan dapat dilibatkan dalam pengembangan UMKM melalui skema *triple helix*.

Kasus sukses dari pengembangan UMKM berbasis daerah dapat dilihat pada beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Banyuwangi, Sleman, dan Kulon Progo. Di daerah-daerah ini, pemerintah daerah berhasil menginisiasi program-program inovatif seperti pelatihan digital, kemitraan strategis dengan *e-commerce* nasional, dan festival produk lokal yang memperkenalkan UMKM ke pasar yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, kemampuan birokrasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Lebih jauh lagi, pendekatan pembangunan UMKM perlu mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya setempat. Di wilayah-wilayah seperti Papua Pegunungan, misalnya, pengembangan UMKM harus berbasis pada potensi adat, gotong royong, dan ekonomi komunal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya menjadi fasilitator ekonomi, tetapi juga pelindung identitas budaya lokal agar tidak tergilas oleh arus globalisasi ekonomi. Menurut Suryani (2022), pengembangan UMKM berbasis budaya lokal terbukti lebih berkelanjutan karena memiliki basis sosial yang kuat dan mampu menciptakan ikatan antara pelaku usaha dengan komunitasnya.

Akhirnya, perlu ditekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi melalui penguatan UMKM tidak dapat dicapai hanya dengan kebijakan yang bersifat administratif atau proyek jangka pendek.

Diperlukan komitmen jangka panjang, pendanaan berkelanjutan, sistem monitoring dan evaluasi yang akurat, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, sektor UMKM dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian dalam peneitian ini adalah para pegiat UMKM yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Sampel menurut Sugiyono (2019:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (mewakili). Teknik penentuan sampel menggunakan *Exhausttive Sampling*. Pada penelitian ini seluruh populasi sumber digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan untuk menghindari timbulnya persepsi diskriminasi terhadap responden tertentu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi data memberikan sebuah gambaran umum tentang hasil penyebaran kuesioner. Deskripsi data dalam penelitian mencakup jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan dan pendidikan. Data responden seluruhnya yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 43 reponden.

1. Data responden berdasarkan jenis kelamin

Gambar 1

Grafik data Jenis Kelamin

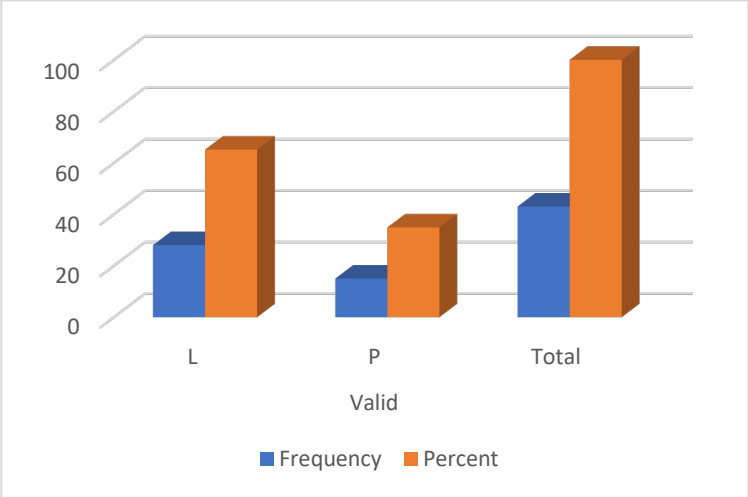

Berdasrkan gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah reponden yang diambil oleh peneliti adalah 28 orang dengan tingkat presentase sebesar 65,1 % untuk respoden laki-laki dan 15 orang dengan tingkat presentase 34,9 % untuk responden perempuan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner secara acak, artinya peneliti tidak membeda-bedakan responden.

2. Data responden berdasarkan usia

Gambar 2

Grafik responden berdasarkan usia

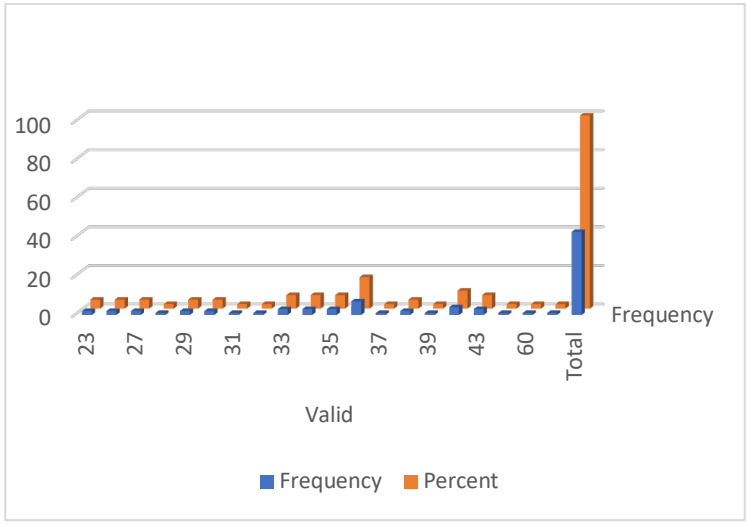

Berdasarkan gabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah responden yang berusia 23-30 tahun sebanyak 11 orang dengan tingkat presentase 25,8 % , jumlah responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 22 orang dengan tingkat presentase sebesar 51,2 %, kemudian jumlah responden yang berusia 41-63 tahun sebanyak 10 orang dengan tingkat prresentase sebesar 23 %.

3. Data responden berdasarkan Pendidikan

Gambar 3

Data responden berdasarkan pendidikan

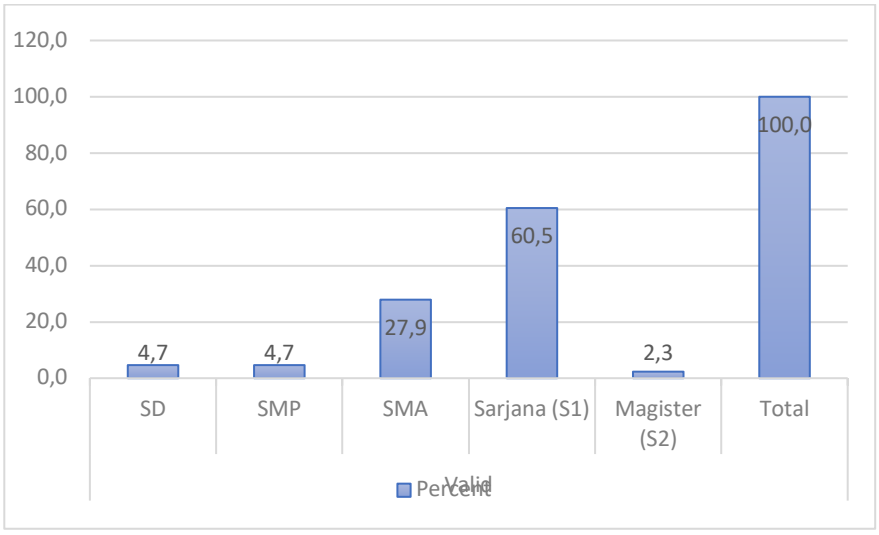

Berdasarkan grafik pada gambar 3 diatas dapat di intepretasikan bahwa pada tingkat jenjang pendidikan yang hanya berpendidikan SD ada 2 orang dengan tingkat presentase 4,7 %, untuk tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 orang dengan presentase 4,7 %, untuk tingkat pendidikan SMA sebanyak 12 orang denga presentase 27,9 %, untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 26 orang dengan

presentase 60,5 % sedangkan untuk tingkat pendidikan Magister (S2) ada 1 orang dengan tingkat presentase 2,3 %.

4. Data responden berdasarkan Pendapatan

Gambar 4

Data responden berdasarkan Pendapatan

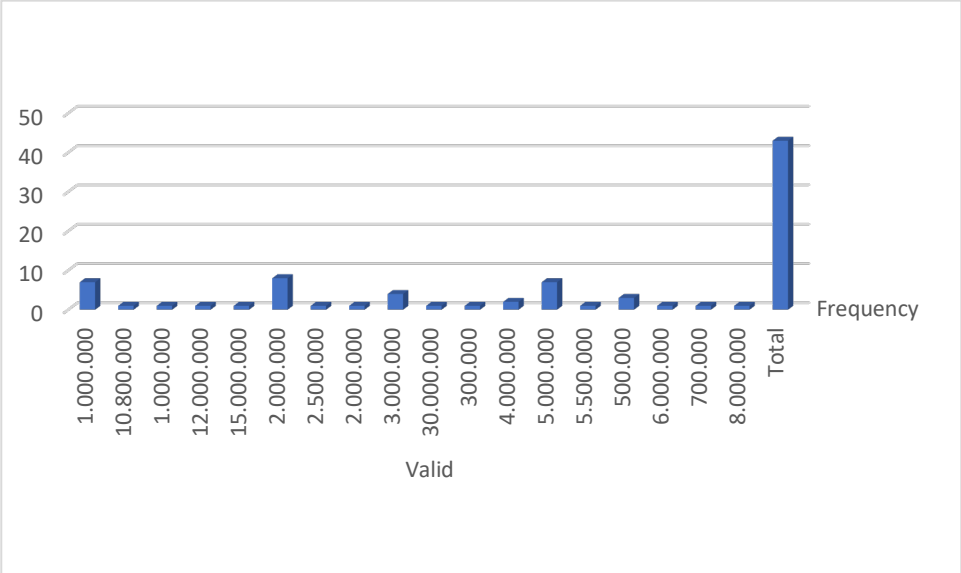

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelakan bahwa pendapatan yang paling rendah sebesar Rp. 300.000 pada usaha anyaman dan pendapatan paling tinggi adalah Rp. 30.000.000 pada usaha Kopi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan dari masing-masing jenis usaha yang dijalankan oleh responden memiliki pendapatan yang bervariasi.

Dari diagram diatas juga kita bisa lihat bahwa pegiat UMKM yang berpenghasilan Rp. 1.000.000 sebanyak 8 orang dengan tingkat presentase 18,6 %, yang bepenghasilan Rp. 10,8 juta sebanyak 1 orang dengan tingkat presentase 2,3 %, yang berpenghasilan 12 juta sebanyak 1 orang dengan tingkat presentase 2,3 %, yang berpenghasilan 2 juta sebanyak 8 orang dengan tingkat presentase 18,6 % dan penhasilan yang paling tinggi sebesar Rp. 30 juta sebanyak 1 orang dengan tingkat presentase 2,3 %

Peran pemerintah daerah terhadap perkembangan UMKM

Tabel 1

Hasil uji peran pemerintah terhadap perk. UMKM

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	49,220	4,046		12,164	0,000
	x	0,803	0,383	0,311	2,096	0,042

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana antara variabel peran pemerintah daerah (X) terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Wamena (Y), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 49,220+0,803X

Nilai konstanta sebesar 49,220 menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat peran pemerintah (X = 0), maka perkembangan UMKM tetap memiliki nilai sebesar 49,220. Hal ini mencerminkan bahwa UMKM di Kota Wamena telah memiliki kapasitas dasar untuk berkembang secara mandiri. Namun demikian, nilai koefisien regresi sebesar 0,803 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam peran pemerintah akan meningkatkan perkembangan UMKM sebesar 0,803. Ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah memiliki kontribusi nyata dan positif terhadap pertumbuhan UMKM.

Hasil uji t menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,096 dengan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,042. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel peran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM di Kota Wamena. Artinya, hipotesis alternatif (Ha) diterima, dan hipotesis nol (H0) ditolak.

Koefisien Beta terstandarisasi (*Standardized Coefficient Beta*) sebesar 0,311 memperkuat kesimpulan tersebut, di mana peran pemerintah memiliki pengaruh positif dalam skala standar terhadap perkembangan UMKM, meskipun bukan satu-satunya faktor dominan. Nilai Beta ini menunjukkan bahwa peran pemerintah berkontribusi sebesar 31,1% terhadap variasi perubahan perkembangan UMKM, sementara sisanya mungkin dipengaruhi oleh faktor lain seperti akses permodalan, inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, dan jaringan pasar.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Sumadi dan Prathama (2021), yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah daerah dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan kemudahan perizinan mampu mendorong kinerja UMKM secara signifikan. Konsisten juga dengan

penelitian yang di lakukan oleh Vianney, L. S. (2024) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah Provinsi Papua Pegunungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Intervensi atau peran Pemerintah daerah khususnya dalam bentuk bantuan modal, terbukti memberikan dampak positif nyata bagi kemajuan UMKM. Dengan hasil ini mempertegas betapa pentinya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor UMKM Provinsi Papua Pegunungan melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran. Dalam konteks lokal seperti Kota Wamena, keberadaan pemerintah sangat krusial dalam memberikan dukungan kelembagaan dan penguatan kapasitas usaha, terutama dalam kondisi geografis dan sosial yang menantang
.

Implikasi dari hasil ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendesain dan mengimplementasikan program-program yang bersifat strategis dan kontekstual untuk UMKM. Program yang berbasis pada potensi lokal, seperti pengembangan usaha berbasis hasil pertanian dan kerajinan khas Wamena, dapat menjadi prioritas. Selain itu, pendampingan berkelanjutan, kemudahan akses teknologi, dan pelatihan pencatatan keuangan menjadi faktor penting yang perlu disinergikan dengan kebijakan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam memperkuat ekosistem usaha mikro di Wamena. Untuk meningkatkan efektivitasnya, dibutuhkan komitmen kelembagaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan program.

Berdasarkan kuesioner yang peneliti sebarkan kepada pegiat UMKM di Kota Wamena ada beberapa item pertanyaan yang sangat penting dan sangat diharapkan oleh pelaku UMKM yaitu:

1. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha, dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam UMKM, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu melakukan upaya-upaya untuk menambah wawasan dan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM. Pemberian pelatihan merupakan upaya dalam meningkatkan kinerja dan inovasi, sehingga pelaku UMKM diharapkan memiliki modal yang kuat dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang terjadi. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, responden dominan meminta agar pemerintah selalu memberikan penyuluhan kewirausahaan, dan juga melakukan seminar yang dilakukan di tiap sektor UMKM agar kedepannya bisa lebih maju.

2. Bantuan Pendanaan/Permodalan

Modal merupakan factor yang paling utama sebagai penunjang keberhasilan dalam suatu kegiatan usaha, karena modal merupakan alat utama yang digunakan dalam menjalankan usaha seperti membeli bahan baku, membeli peralatan usaha. Modal merupakan aspek yang sangat penting dalam usaha dan menjadi salah satu kendala atau permasalahan yang sering dialami oleh pelaku usaha khususnya pelaku UMKM.

Dengan keterbatasan modal membuat para pelaku UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya dan mengakibatkan tidak mampu untuk bersaing dengan pelaku usaha besar karena produk yang dihasilkan tidak maksimal, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memiliki kewajiban dalam membantu memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM yang membutuhkan, karena hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam pasal 1 Ayat 11 yang menyatakan bahwa pembiayaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank agar dapat mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Berdasarkan undang-undang UMKM tersebut diwajibkan kepada Pemerintah untuk memberikan bantuan permodalan kepada para pelaku UMKM, baik dalam bentuk pemberian dana hibah, pinjaman modal dan lain-lain. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada pegiat UMKM tentang hal bantuan dana dalam mengembangkan usahaya, para pelaku dominan sangat setuju agar pemerintah memberikan bantuan berupa dana.

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa peran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Wamena, Papua Pegunungan. Melalui analisis regresi linear sederhana, ditemukan bahwa setiap peningkatan peran pemerintah secara langsung meningkatkan perkembangan UMKM, meskipun UMKM di daerah ini sudah memiliki kemampuan dasar untuk bertahan dan berkembang secara mandiri. Peran pemerintah daerah terbukti penting dalam menyediakan dukungan berupa pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal, serta fasilitasi akses perizinan dan pemasaran. Pelaku UMKM membutuhkan pelatihan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan inovasi produk agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Selain itu, keterbatasan modal menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi melalui bantuan dana dari pemerintah.

Temuan ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa UMKM berperan sebagai pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM agar lebih produktif dan berkelanjutan. Kondisi geografis dan sosial Kota Wamena yang unik membutuhkan pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis kearifan lokal. Program-program pemerintah harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kondisi masyarakat agar dapat diterima dengan baik dan efektif dalam meningkatkan kualitas UMKM. Dukungan kelembagaan serta inovasi kebijakan yang mengakomodasi potensi lokal seperti produk pertanian dan kerajinan khas daerah menjadi hal yang sangat penting.

Meskipun peran pemerintah signifikan, kontribusinya baru mencapai sekitar 31,1% terhadap variasi perkembangan UMKM, menunjukkan perlunya penguatan dan sinergi dengan faktor-faktor lain seperti teknologi digital, jaringan pemasaran, dan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dapat memperkuat ekosistem UMKM secara menyeluruh. Digitalisasi usaha juga menjadi aspek penting yang harus didorong untuk meningkatkan akses pasar dan efisiensi operasional UMKM di era modern ini. Pemerintah daerah perlu membuka akses teknologi dan memberikan pelatihan literasi digital agar pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penggerak utama dalam pembangunan ekonomi berbasis UMKM di Kota Wamena. Komitmen yang kuat, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, dan pendekatan yang partisipatif akan memperkuat kontribusi sektor UMKM bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Saran

Pemerintah daerah perlu fokus mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan pelaku UMKM, sekaligus memfasilitasi akses modal melalui dana hibah atau pinjaman dengan suku bunga rendah guna mengatasi kendala *finansial*. Pengembangan infrastruktur teknologi dan jaringan internet juga penting agar UMKM dapat memperluas pasar secara *digital*. Selain itu, membangun kemitraan dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan komunitas lokal serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan program akan memastikan kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dukungan khusus pada pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal, seperti hasil pertanian dan kerajinan khas, perlu diprioritaskan untuk meningkatkan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Budiyanto, M. A., & Effendy, M. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM. *OSF Preprints*. https://doi.org/10.31219/osf.io/3ykjx

Karimah, H., Hasanah, U., & Sofwan, M. (2021). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 12(1), 57–66. https://doi.org/10.21067/jem.v12i1.5315

Maharani, N. S., & Nurlukman, A. A. (2021). Strategi Digitalisasi UMKM di Era Pandemi. *Sebatik*, 27(1), 45–53. https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2160

Menajang, A. (2019). Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 12–24.

Sumadi, R. (2021). Inovasi Daerah dalam Penguatan UMKM Berbasis Lokal. *Syntax Literate*, 6(5), 34–45. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701

Suryani, I. (2022). Kearifan Lokal dan Pemberdayaan UMKM di Wilayah Adat. *OSF Preprints*. https://doi.org/10.31219/osf.io/khv96

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan UMKM Kerajinan Limbah Kayu sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 187–195. https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26900

Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Vianney, L. S. (2024). Analisis Peran Pemerintah Dan Akademisi Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Provinsi Papua Pegunungan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(6), 3255–3263. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16562